



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI 2 JALAN KAPTEN A, RIVAI NO.2-4 PALEMBANG
TELEPON 0711-351476 3, 356534, FAKSIMILE 0711-310891

Nomor : S-1693/WPB.07/2018
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Penyampaian Kajian Fiskal Regional
Triwulan III Tahun 2018

13 November 2018

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
C.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran
di Jakarta

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan No.SE-61/PB/2017 tanggal 5 Agustus 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, bersama ini disampaikan Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2018 yang *softcopy*-nya dikirimkan via e-mail ke alamat lo.ditpa@gmail.com.

Adapun materi dalam KFR tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan dan Analisis Indikator Ekonomi Provinsi Sumsel.
2. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN.
3. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD.
4. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian APBN dan APBD.
5. Berita fiskal regional.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Tauhid

Kp : WPB.07/BD.0201/2018

"Bersama Anda Membangun Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Selatan"



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL



TRIWULAN III
2018

Penyusun:

Penanggung Jawab: Tauhid I Ketua Tim: Soegihartono I
Editor: Jaka Trisna I Desain Grafis: Firdaus I Anggota: Iwan Dwi
Kuswoyo I Armizali I Decta Pitron Lugastoro I Markus Yulianto I

KANWIL DJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Sumsel

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dapat menyusun Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2018 ini.

Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk memberikan gambaran kondisi fiskal dan perekonomian regional Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan III tahun 2018 yang diharapkan dapat menjadi media informasi yang bernilai strategis baik kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun sebagai media informasi untuk para mitra kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi memberikan data dan informasi demi terwujudnya Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan ini. Kami harapkan koordinasi dan kerjasama tersebut dapat terus berlanjut di masa mendatang guna mendukung kesinambungan Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari semua pihak selalu kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan serta peningkatan kualitas kajian ini.

Harapan kami semoga Kajian Fiskal Regional ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, *stakeholders* dan masyarakat pada umumnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam upaya memberikan kontribusi pemikiran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, November 2018
Kepala Kantor Wilayah,

ttd

Taukhid



DAFTAR ISI

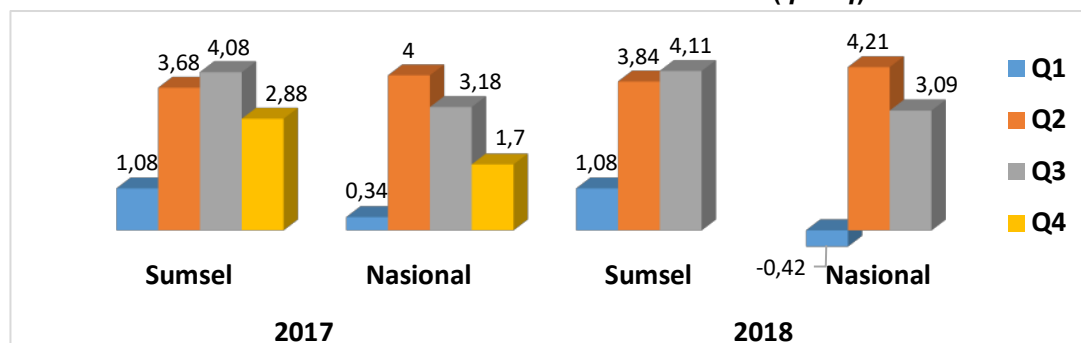
I.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL	
A.	Produk Domestik Regional Bruto	1
B.	Inflasi	1
C.	Indikator Kesejahteraan	2
II.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN	
A.	Pendapatan Negara	5
B.	Belanja Negara	9
C.	Prognosis Realisasi APBN	11
III.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD	
A.	Pendapatan Daerah	13
B.	Belanja Daerah	17
C.	Prognosis Realisasi APBD	17
IV.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)	18
V.	BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH	23

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu dan dalam satu kurun waktu tertentu.

Grafik I.1 Pertumbuhan PDRB Tahun 2017 dan Tahun 2018 (q-to-q)



Sumber: BPS Prov.Sumsel (2018) diolah

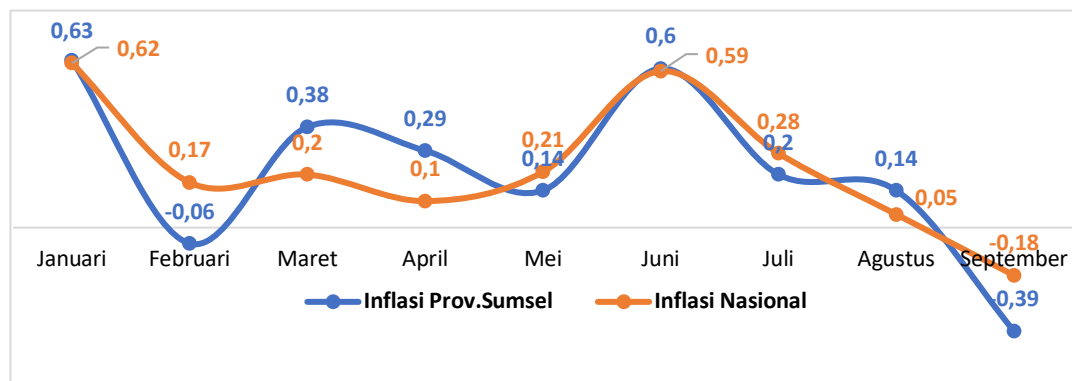
PDRB Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan III tahun 2018 meningkat 4,11 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,55 persen. Sementara dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Ekspor Luar Negeri yang meningkat signifikan sebesar 20,54 persen.

Pertumbuhan ekonomi Sumsel triwulan III tahun 2018 sebesar 6,14 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh 13,58 persen. Di sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Luar Negeri yang tumbuh sebesar 17,27 persen.

B. Inflasi

Inflasi merupakan peningkatan harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor.

Grafik I.2. Tingkat Inflasi Bulanan Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018



Sumber: BPS Prov.Sumsel (2018) diolah

Grafik di atas menunjukkan bahwa inflasi bulanan di Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan III tahun 2018 terjadi penurunan. Pada bulan September 2018 terjadi penurunan dari bulan-bulan sebelumnya dimana terjadi deflasi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,39 persen, lebih rendah jika dibanding deflasi secara nasional yang sebesar 0,18 persen. Adapun komoditas yang menyumbang andil deflasi terbesar pada bulan September 2018 di Provinsi Sumatera Selatan adalah cabe merah, daging ayam ras, bawang merah dan telur ayam ras.

C. Indikator Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan adalah indikator yang dapat menilai/mengevaluasi keberhasilan pembangunan dalam hal ini ketercapaian tujuan fiskal antara lain tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia.

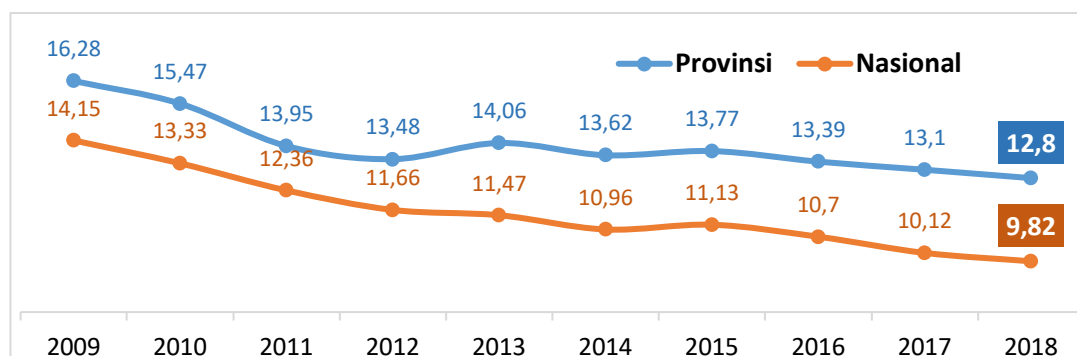
1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada bulan Agustus 2018 TPT di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 4,23 persen, mengalami penurunan dibandingkan bulan Agustus 2017 sebesar 4,39 persen atau turun 0,16 persen. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi diantara pendidikan lain yaitu sebesar 9,94 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 8,78 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja yang dapat dilihat dari TPT dengan pendidikan SD ke bawah merupakan yang paling rendah yaitu 1,43 persen.

2. Persentase Penduduk Miskin

Penduduk miskin diukur berdasarkan tingkat garis kemiskinan yang ditetapkan di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar Rp388.060,00 di perkotaan dan Rp331.570,00 di pedesaan.

Grafik I.3 Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: BPS Prov. Sumsel (2018) diolah

Jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2018 di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 1,07 juta orang atau 12,80 persen dari total jumlah penduduk, turun 0,30 persen dibandingkan periode Maret 2017. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan inflasi di Sumsel serta hasil dari program-program pemerintah misalnya Kredit Usaha Rakyat, Dana Desa, Bantuan Pemerintah, dan berbagai program di bidang kesehatan dan pendidikan serta semakin membaiknya kondisi infrastruktur dan perekonomian. Meskipun demikian persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan masih di atas rata-rata penduduk miskin secara nasional dan belum memenuhi target RPJMD tahun 2018 yang sebesar 11,78 persen.

3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang memberikan ukuran pencapaian pembangunan berdasarkan perbandingan aspek dasar manusia yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu IPM digunakan untuk mengukur pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kualitas hidup masyarakat. Semakin tinggi IPM maka semakin baik pencapaian pembangunan manusia (indeks 0-1).

Tabel I.1 Perkembangan IPM Nasional dan Sumbagsel

URAIAN	2015	2016	2017
Nasional	69,55	70,18	70,81
Jambi	69,05	69,62	69,99
Babel	68,89	69,55	69,99
Bengkulu	68,59	69,33	69,95
Sumsel	67,46	68,24	68,86
Lampung	66,95	67,65	68,25

Sumber: BPS Prov.Sumsel (2018) diolah

Dilihat dari grafik di atas, dari tahun ke tahun IPM di wilayah Sumbagsel selalu meningkat. Data terakhir IPM tahun 2017 menunjukkan bahwa IPM Sumatera Selatan adalah 68,86. Kualitas pembangunan manusia berdasarkan IPM di wilayah Sumbagsel memang masih dibawah kualitas pembangunan manusia secara nasional, dimana IPM Nasional sudah mencapai 70,81. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di wilayah Sumatera Selatan masih tertinggal jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Bahkan untuk wilayah Sumbagsel, IPM Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu yang terendah.

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Pada bab ini berisi data dan analisis pelaksanaan APBN di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Pendapatan Pemerintah Pusat, Belanja Pemerintah Pusat, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, dan Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat. Pelaksanaan APBN di Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel II.1. yang disajikan dalam format *I-Account*.

Tabel II.1. Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan III Tahun 2016-2018 (miliar rupiah)

Uraian	2016		2017		2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA	14.958,40	9.627,26	14.497,92	8.337,93	15.028,18	9.846,46
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	14.958,40	9.627,26	14.497,92	8.337,93	15.028,18	9.846,46
1. Penerimaan Pajak	13.764,11	8.269,97	12.899,72	6.727,89	13.347,34	8.420,96
2. PNBPN	1.194,29	1.357,29	1.598,20	1.610,04	1.680,83	1.425,49
II. HIBAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. BELANJA NEGARA	40.511,64	27.143,29	48.969,88	29.179,95	42.888,15	29.276,04
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	12.482,51	7.369,78	13.433,57	7.879,59	14.304,69	7.965,38
1. Belanja Pegawai	3.931,77	2.995,88	4.164,36	3.046,57	4.472,44	3.302,51
2. Belanja Barang	4.876,50	2.805,74	4.979,18	2.899,25	6.035,80	3.165,08
3. Belanja Modal	3.649,17	1.556,72	4.263,57	1.915,70	3.782,88	1.492,43
4. Belanja Bantuan Sosial	25,07	11,44	26,47	18,07	13,57	5,36
5. Belanja Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. TKDD	28.029,13	19.773,50	35.536,31	21.300,36	28.583,47	21.310,66
1. Transfer ke Daerah	26.248,36	18.091,09	33.269,05	19.946,01	26.269,34	19.923,45
a. Dana Perimbangan	26.248,36	18.091,09	33.269,05	19.946,01	26.269,34	19.923,45
1) DBH	7.783,26	4.820,74	15.375,99	6.094,81	7.232,03	4.900,94
2) DAU	11.660,87	9.595,14	12.219,36	10.188,75	12.331,39	10.268,07
3) DAK Fisik	2.591,39	980,11	1.881,55	1.165,11	2.357,10	1.423,24
4) DID	165,59	165,59	82,50	82,50	396,75	349,00
5) DAK Non Fisik	4.047,24	2.529,50	3.709,65	2.414,85	3.952,07	2.982,19
b. Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Dana Transfer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dana Desa	1.780,77	1.682,42	2.267,26	1.354,34	2.314,12	1.387,21
C. SURPLUS/DEFISIT (A-B)	25.553,24	17.516,03	34.471,96	20.842,01	27.859,97	19.429,59
D. PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : DJP, OM-SPAN, Monev PA, MPN-G2, Simtrada DJPK (2018), diolah.

Pada tabel II.1. di atas, struktur APBN terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Komponen Penerimaan Dalam Negeri pada sisi Pendapatan berasal dari komponen Perpajakan dan PNBPN. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp9,8 triliun atau 65,52 persen dari target yang

ditetapkan. Realisasi tersebut berasal dari kontribusi Penerimaan Pajak sebesar 85,52 persen dan PNBPN sebesar 14,48 persen. Komponen Hibah bernilai nihil karena pendapatan Hibah hanya terdapat pada level kementerian/lembaga atau pada APBN tingkat nasional sedangkan Hibah yang terdapat di satuan kerja daerah dicatat sebagai belanja. Sama halnya dengan sisi Pembiayaan yang hanya terdapat pada APBN tingkat nasional sehingga Pembiayaan pada APBN tingkat provinsi bernilai nihil.

Sisi belanja dibagi menjadi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pada Belanja Pemerintah Pusat terjadi sedikit perlambatan penyerapan sehingga sampai dengan triwulan III tahun 2018 baru terserap 55,68 persen atau dibawah target 60 persen. Dengan kondisi Pendapatan dan Belanja diatas maka sampai dengan periode ini APBN di Provinsi Sumatera Selatan mengalami defisit sebesar Rp19,42 triliun.

A. Pendapatan Negara

Pendapatan Negara dibagi menjadi Penerimaan Pajak dan PNBPN. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 Pendapatan Pajak terealisasi Rp8,4 triliun sedangkan PNBPN sebesar Rp1,4 triliun. Realisasi pendapatan pajak dan PNBPN di atas menjadi penerimaan tertinggi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

1. Pendapatan Perpajakan

Total pendapatan pajak di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 berjumlah Rp7,6 triliun. Pajak Penghasilan menyumbang 59,74 persen dari total pendapatan tersebut. Berikut rincian pendapatan pajak berdasarkan jenis pajak:

Tabel II.2 Pendapatan Perpajakan di Provinsi Sumsel Tahun 2016-2018 (miliar Rp)

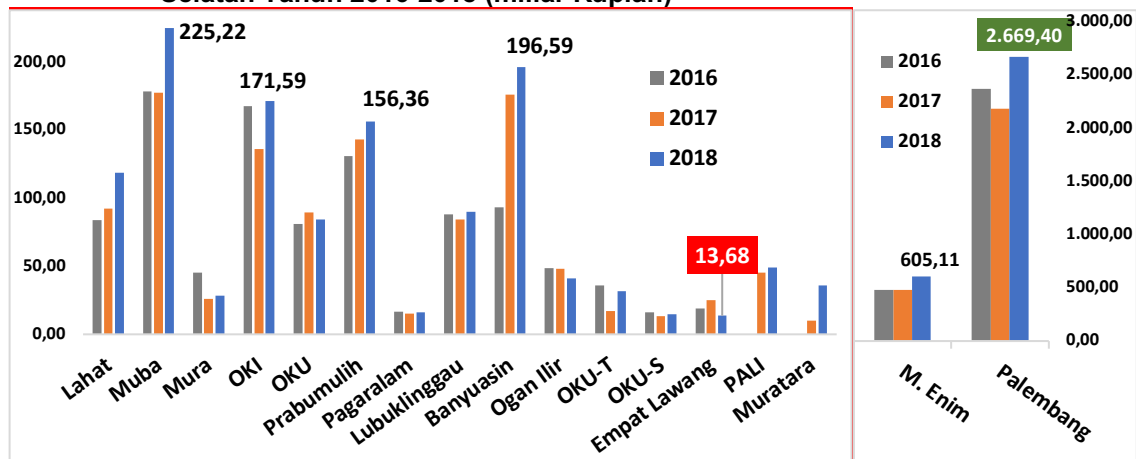
Jenis Pajak	Realisasi s.d. Triwulan III		
	2016	2017	2018
PPh (4111)	4.252,72	3.760,15	4.557,81
PPN (4112)	2.286,91	2.082,92	1.886,97
PBB (4113)	975,76	188,25	1.094,03
Cukai (4115)	668,13	607,33	791,57
Pajak Lainnya (4116)	86,46	89,24	90,59
JUMLAH	8.269,97	6.727,89	8.420,96

Sumber : Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel, MPN G-2 (2018), diolah.

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pendapatan total pajak penghasilan di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan III Tahun 2018 berjumlah Rp4,5 triliun dengan rincian pendapatan per kabupaten/kota sebagai berikut:

Grafik II.1 Realisasi Pendapatan PPh Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018 (miliar Rupiah)



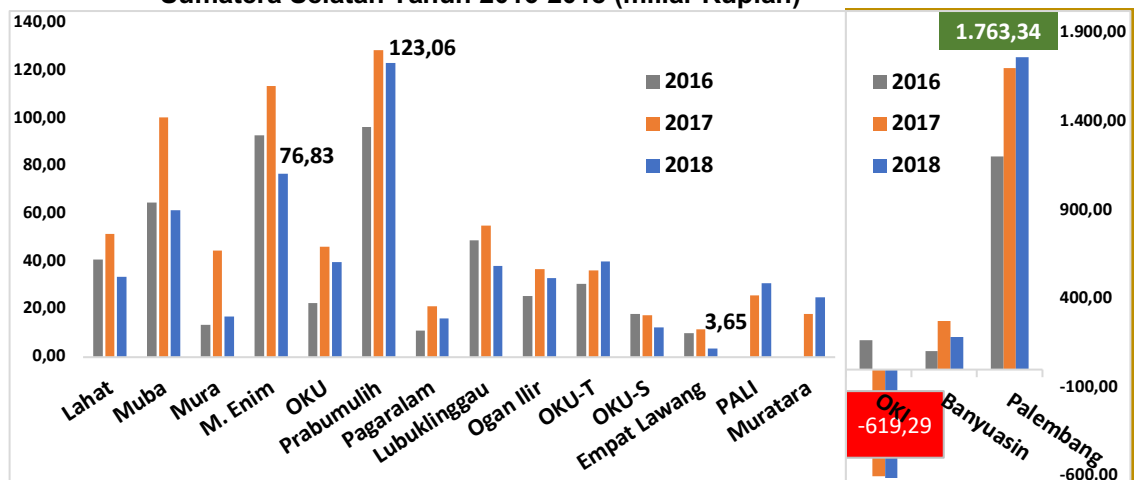
Sumber : Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel (diolah)

Dari 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, pendapatan Pajak Penghasilan tertinggi terdapat di Kota Palembang disusul kemudian Kabupaten Muara Enim. Hal ini disebabkan Kota Palembang merupakan pusat ekonomi di Sumsel. Adapun pendapatan terendah terdapat di Kabupaten Empat Lawang dengan realisasi sebesar Rp13,68 miliar. Pendapatan PPh pada Triwulan III Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 26,7 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Sedangkan berdasarkan periode yang sama Tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 36,08 persen

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)

Total Pendapatan PPN dan PPnBM di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan III 2018 sebesar Rp1,88 triliun dengan rincian pendapatan per kabupaten/kota sebagai berikut :

Grafik II.2 Realisasi Pendapatan PPN dan PPnBM Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018 (miliar Rupiah)



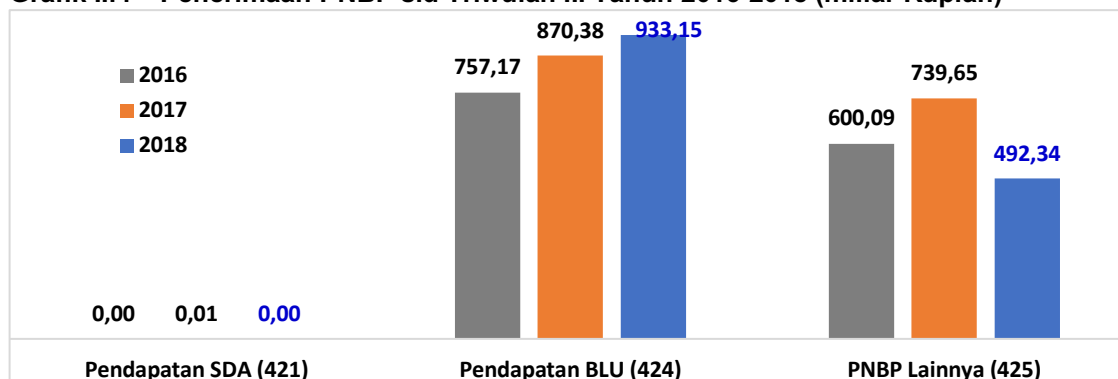
Sumber : Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel (2018), diolah.

Penerimaan pajak berikutnya adalah pendapatan Pajak Pertambahan Nilai yang terdiri dari pendapatan PPN dan pendapatan PPnBM. Pendapatan PPN pada tahun 2018 secara *agregat* mengalami penurunan sebesar 9,71 persen dibandingkan tahun 2017. Faktor utama penurunan tersebut masih disebabkan adanya restitusi pajak kepada perusahaan OKI dan Pulp Paper Mills sebesar 619 miliar rupiah. Namun jika dilihat penerimaan PPN masing-masing kabupaten/kota pada grafik diatas, mayoritas mengalami penurunan. Hanya tiga kabupaten dan satu kota yang mengalami peningkatan penerimaan PPN yaitu Kabupaten OKU Timur, Kabupaten PALI, Kabupaten Muratara dan Kota Palembang. Kenaikan tersebut disebabkan karena pembangunan di tiga kabupaten baru tersebut masih massif dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dengan kabupaten/kota lain sedangkan peningkatan di Kota Palembang disebabkan beberapa pembangunan yang dilakukan dalam rangka perhelatan event Asian Games yang diadakan di Palembang pada bulan Agustus-September.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Total penerimaan PNBPN di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 berjumlah Rp1,4 triliun yang berasal dari Pendapatan BLU dan PNBPN Lainnya. Penerimaan PNBPN di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 dengan rincian masing-masing penerimaan per jenis PNBPN terlihat pada grafik dibawah.

Grafik II.4 Penerimaan PNBPN s.d Triwulan III Tahun 2016-2018 (miliar Rupiah)



Sumber: OM-SPAN (diakses 26-10-2018)

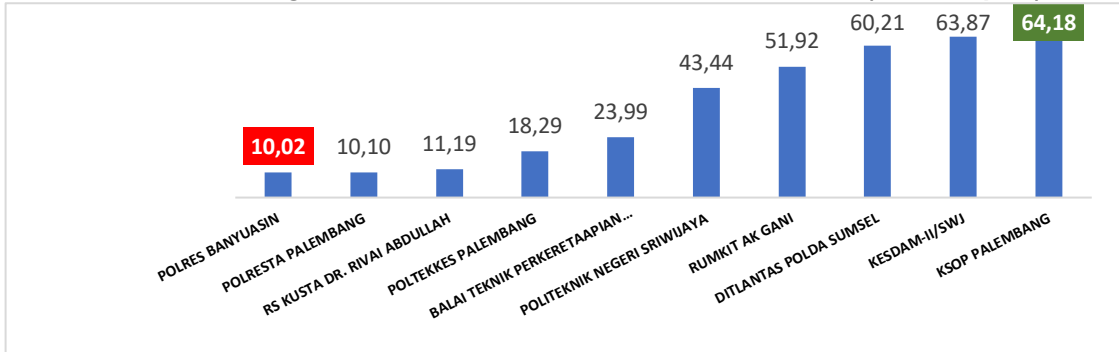
Pendapatan BLU senantiasa mengalami kenaikan dari tahun 2016 dengan pertumbuhan 23,24 persen. Sedangkan pendapatan PNBPN Lainnya mengalami penurunan 17,96 persen dengan total penerimaan sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp492 miliar.

a. Pendapatan PNBPN Lainnya

Pendapatan PNBPN Lainnya sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 berjumlah Rp492 miliar atau 34,54 persen total PNBPN keseluruhan. Jumlah tersebut berasal dari penerimaan 386 satker, baik satker umum (PNBPN umum) maupun satker PNBPN (PNBPN fungsional). Pendapatan PNBPN Lainnya Tahun 2018 mengalami penurunan drastis

dibandingkan pendapatan pada Tahun 2017 sebesar 33,44 persen. Berikut ini disajikan 10 satker dengan penerimaan PNBP Lainnya terbesar sampai dengan Triwulan III Tahun 2018.

Grafik II.5. Satker dengan PNBP Terbesar s.d. Triwulan III Tahun 2018 (miliar Rupiah)



Sumber : OM-SPAN (diakses 26-10-2018)

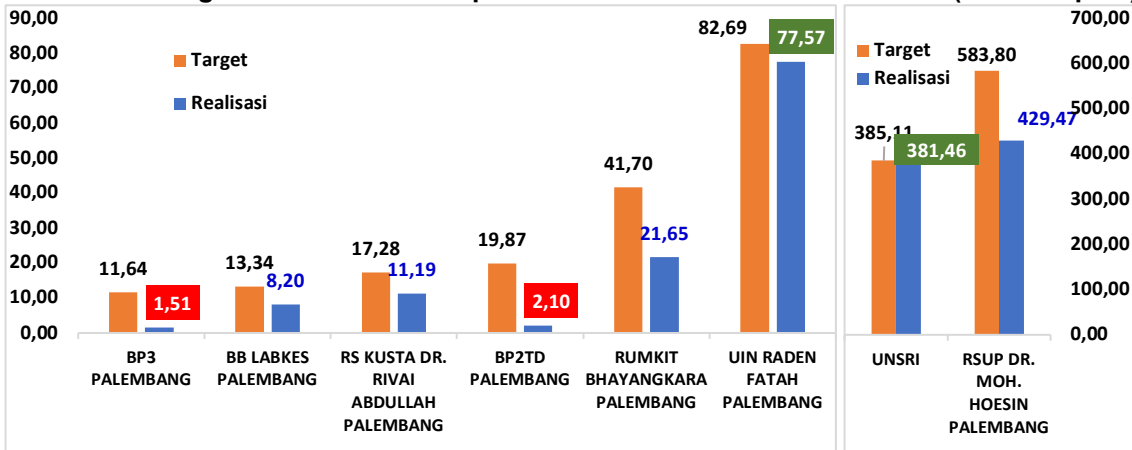
Dari sepuluh besar satker diatas terdapat pergeseran urutan dibandingkan grafik penerimaan pada triwulan II. Satker RS Kusta Dr. Rivai Abdullah naik menjadi peringkat kedelapan dengan penerimaan terbesar. Kenaikan penerimaan tersebut dikarenakan adanya penerimaan kembali belanja modal TAYL sebesar Rp 6,48 miliar. Sedangkan pergeseran pada Satker KSOP disebabkan kenaikan pendapatan jasa kepelabuhanan dari Rp26,4 miliar menjadi Rp43,9 miliar.

Adapun penerimaan terbesar PNBP Lainnya pada satker Kesdam-II/SWJ sebesar Rp63,87 miliar mayoritas berasal dari pendapatan dari BPJS kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) dengan kontribusi sebesar Rp55,1 miliar. Jenis pendapatan tersebut juga menjadi penyumbang terbesar pada satker Rumkit Tk. II Dr. AK. Gani dan satker-satker kesehatan lainnya.

b. Pendapatan BLU

Pendapatan PNBP ini berasal dari 8 BLU di Provinsi Sumsel dengan total pendapatan sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp933,15 miliar dengan rincian :

Grafik II.6. Target & Realisasi Pendapatan BLU s.d. Triwulan II Tahun 2018 (miliar Rupiah)



Sumber : e-rekon-lk (diakses 07-11-2018)

Dari grafik diatas terlihat bahwa dari delapan satker BLU yang terdapat di Kota Palembang, dua satker sudah membukukan pendapatan BLU mendekati target yang ditetapkan. Universitas Sriwijaya dengan target Rp385,11 miliar telah terealisasi sebesar Rp381,46 miliar atau 99 persen sedangkan UIN Raden Fatah Palembang dengan target Rp82,69 miliar telah terealisasi sebesar Rp77,57 miliar atau 93,81 persen. Jika dilihat secara nominal maka target dan realisasi terbesar terdapat pada satker RSUP Dr. Moh. Hoesin Palembang. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 masih terdapat dua satker BLU dengan realisasi pendapatan dibawah 15 persen yaitu BP3 Palembang dengan realisasi 12,9 persen dan BP2TD Palembang dengan realisasi pendapatan 10,5 persen.

B. Belanja Negara

Belanja negara dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Triwulan III tahun 2018 berjumlah Rp4,47 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.3 Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018 (miliar Rupiah)

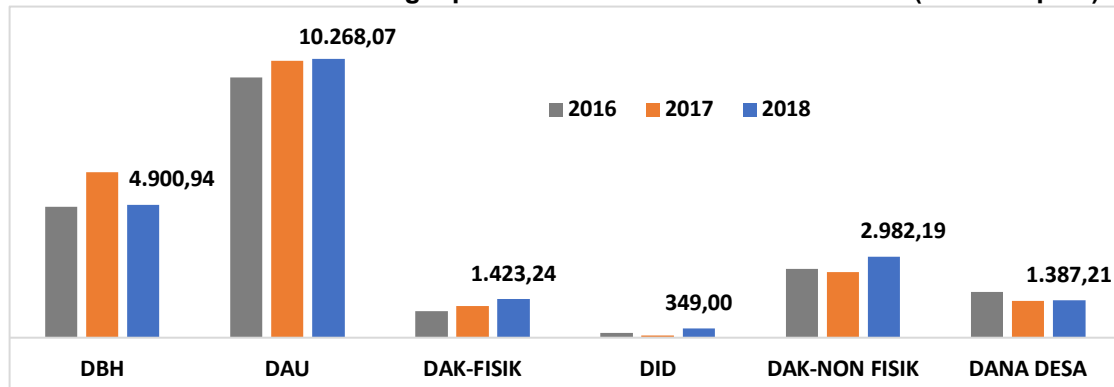
Jenis Belanja	2016		2017		2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Belanja Pegawai	3.931,77	2.995,88	4.164,36	3.046,57	4.472,44	3.302,51
Belanja Barang	4.876,50	2.805,74	4.979,18	2.899,25	6.035,80	3.165,08
Belanja Modal	3.649,17	1.556,72	4.263,57	1.915,70	3.782,88	1.492,43
Belanja Bansos	25,07	11,44	26,47	18,07	13,57	5,36
Jumlah	12.482,51	7.369,78	13.433,57	7.879,59	14.304,69	7.965,38

Sumber: Monev PA (diakses 08-11-2018)

Realisasi belanja sampai dengan triwulan III tahun 2018 sebesar Rp7,96 triliun atau 55,68 persen. Kinerja realisasi tersebut menjadi yang terendah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Realisasi tersebut juga dibawah target realisasi triwulan III sebesar 60 persen. Dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, semua komponen belanja mengalami penurunan dengan realisasi terendah terdapat pada Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi masing-masing sebesar 39,45 persen dan 39,52 persen

2. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Pada tahun 2017 terdapat perubahan penyaluran TKDD. Dua dari enam komponen TKDD yaitu DAK Fisik dan Dana Desa disalurkan melalui KPPN sedangkan sisanya masih tetap disalurkan melalui Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK). TKDD pada tahun 2018 mendapat alokasi pagu Rp28,5 triliun dengan realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp21 triliun atau 76,86 persen.

Grafik II.7. Realisasi TKDD Lingkup Provinsi Sumsel Tahun 2016-2018 (miliar Rupiah)

Sumber: Simtrada, OM-SPAN (diakses 10-08-2018)

Realisasi TKDD sampai dengan triwulan III Tahun 2018 mayoritas meningkat dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, hanya realisasi DBH yang mengalami penurunan secara nominal. Namun jika dilihat dari kinerjanya, realisasi DBH tahun 2018 adalah yang tertinggi yaitu 67,7 persen. Secara keseluruhan, realisasi TKDD pada Tahun 2018 merupakan yang tertinggi dengan capaian realisasi sebesar 74,56 persen. Dua jenis TKDD yang disalurkan melalui KPPN, realisasi DAK Fisik dan Dana Desa sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 sebesar 60,38 persen dan 59,95 persen. Hal tersebut sesuai dengan tahapan pencairan DAK Fisik dan Dana Desa yang diatur dalam PMK 50 Tahun 2017

3. Manajemen Investasi Pusat

Sesuai PMK Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas dan fungsi pelaksanaan fungsi perbendaharaan di daerah sekaligus menjadi perpanjangan pelaksanaan tugas *special mission* Ditjen Perbendaharaan yang diemban oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Lebih lanjut, amanat tersebut dirinci ke dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2017 dimana Kanwil DJPB diberikan kewenangan oleh Direktorat SMI untuk melaksanakan pembinaan dan monitoring atas investasi pemerintah, pinjaman dan kredit program di daerah.

Tabel II.4 Penyaluran KUR Berdasarkan Skema s.d. Triwulan III 2018 (Rupiah)

Jenis KUR	Realisasi Penyaluran		
	Debitur	Akad	Outstanding
Mikro	43.380	880.087.300.080	709.222.454.340
Ritel	8.998	1.082.864.831.000	849.055.829.407
TKI	589	5.563.266.405	3.887.581.486
UMi	374	2.487.600.000	1.697.340.668
Total KUR	53.341	1.971.002.997.485	1.563.863.205.901

Sumber: SIKP (diakses 01-10-2018)

Penyaluran KUR di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama Tahun 2017. Jika pada tahun 2017 akad yang disetujui sebesar R1,17 triliun maka pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp1,97 triliun. Tingginya jumlah akad yang disetujui dan banyaknya debitur yang mendapat KUR menunjukkan bahwa pembiayaan yang dicanangkan pemerintah melalui KUR dan UMi yang berbasis SIKP semakin diketahui dan direspon positif oleh semua pihak mulai dari pelaku ekonomi sektor UMKM, bank penyalur selaku pemilik dana, pemerintah kabupaten/kota selaku pembina dan penggerak UMKM di daerah sampai dengan Kementerian Keuangan selaku pengelola aplikasi

dan pengguna anggaran yang menetapkan besan subsidi bunga. Peningkatan penyaluran KUR tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran UMKM dalam meningkatkan PAD.

Tabel II.5 Profil Penerusan Pinjaman di Provinsi Sumatera Selatan Posisi s.d. 30 Juni 2018

No	Loan ID	Debitur	Pinjaman (SLA)		
			Nomor Pinjaman	Penarikan	Hak Tagih Pemerintah
1	2074301	PDAM TIRTA MUSI PLG	SLA-EKS BI/1978	13.870.899.892,42	0,00
2	2074401	PDAM TIRTA MUSI PLG	SLA-EKS BI/EKS RDI	3.010.426.000,00	0,00
3	2114401	PEMKOT PALEMBANG	SLA-039/DDI/1982	1.791.404.269,54	0,00
4	2114501	PEMKOT PALEMBANG	SLA-682/DP3/1992	25.736.672.960,00	0,00
5	2114701	PEMKOT PALEMBANG	PRJ-055/MD.4/1987	1.000.000.000,00	0,00
6	2114801	PEMKOT PALEMBANG	RDA-013/DDI/1988	578.942.961,00	0,00
7	2114901	PEMKOT PALEMBANG	RDA-76/DDI/1992	997.297.790,00	0,00
8	9114401	PEMKOT PALEMBANG	AMA-439/SLA-039/2012	1.388.170.300,71	0,00
9	9114501	PEMKOT PALEMBANG	AMA-440/SLA-682/2012	13.933.768.510,19	0,00
10	9114601	PEMKOT PALEMBANG	AMA-132/PRJ-756/2012	2.920.000.000,00	0,00
11	9114701	PEMKOT PALEMBANG	AMA-130/PRJ-055/2012	219.213.675,00	0,00
12	9114801	PEMKOT PALEMBANG	AMA-129/RDA-13/DSMI	231.577.221,00	0,00
13	9114901	PEMKOT PALEMBANG	AMA-131/RDA-76/DSMI	997.297.790,00	0,00
14	2114301	PEMKAB OKU	SLA-610/DDI/1991	155.566.680,00	0,00
15	2192001	PEMKAB MUARA ENIM	SLA-1225/DSMI/2009	97.148.652.820,00	97.148.652.820,00
16	2073501	PEMKAB MUSI RAWAS	RPD-334/Eks.RDA-244/DP3/1996	0,00	0,00
Jumlah		5 DEBITUR	16 SLA	163.979.890.869,86	97.148.652.820,00

Sumber: SLIM (diakses 09-10-2018)

Jumlah penerusan pinjaman di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan posisi rekonsiliasi *outstanding* pinjaman periode 30 Juni 2018 berjumlah 16 pinjaman (SLA) dengan hak tagih pemerintah sebesar Rp97,1 miliar. Berdasarkan Perdirjen Nomor PER-19/PB/2017 maka pengelolaan pinjaman Pemda dan BUMD dialihkan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Adapun penagihan kepada Pemkab Muara Enim baru dilakukan pertama kalinya oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel pada bulan Oktober atau satu bulan sebelum jatuh tempo pembayaran pada tanggal 1 November 2018.

C. Prognosis Realisasi APBN

Menggunakan analisis trend berdasarkan pagu/target dan realisasi tahun 2015-2017, Penerimaan Pajak diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp10,9 triliun atau 81,67 persen sedangkan pendapatan PNBPN diperkirakan akan meningkat dan terealisasi sebesar Rp3,59 triliun atau 213 persen target yang ditetapkan. Kondisi komponen Pendapatan Negara tersebut sesuai dengan tren selama ini dimana tren penerimaan pajak cenderung stabil diangka 80 persen sedangkan tren pendapatan PNBPN cenderung naik dengan pertumbuhan rata-rata 26 persen. Adapun realisasi Belanja Negara diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp37 triliun atau 87 persen sesuai dengan tren realisasi belanja dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang berkisar diangka 90 persen.

Tabel II.3. Perkiraan Realisasi APBN s.d. Akhir Tahun 2018 (miliar Rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Tw-III		Perkiraan Realisasi s.d. Tw-IV	
		Rp	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Negara	15.028,18	9.846,46	65,52%	10.367,40	68,99%
Penerimaan Pajak	13.347,34	8.420,96	63,09%	10.901,41	81,67%
PNBPN	1.680,83	1.425,49	84,81%	3.596,70	213,98%
Belanja Negara	42.888,15	29.276,04	68,26%	37.088,21	86,48%
Surplus/Defisit	-27.859,97	-19.429,59	69,74%	-26.720,81	-17,49%

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Dalam bab ini diuraikan mengenai perkembangan pelaksanaan APBD di lingkup Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan III Tahun 2018. Terdapat 3 (tiga) sub bab yang menjadi pokok bahasan yaitu Pendapatan, Belanja, dan Prognosis APBD.

Tabel III.1. Realisasi Pendapatan APBD s.d Triwulan III Tahun 2016-2018 (miliar Rupiah)

Uraian	2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PAD	5.554	3.204	58%	5.866	3.237	55%	6.795	4.281	63%
Pajak Daerah	3.945	2.397	61%	4.071	2.404	59%	4.403	3.263	74%
Retribusi Daerah	238	123	52%	242	104	43%	244	83	34%
Hasil Peng. Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	161	131	82%	205	116	57%	230	179	78%
Lain-lain PAD yang Sah	1.211	552	46%	1.349	613	45%	1.918	756	39%
PENDAPATAN TRANSFER	27.066	18.520	68%	26.291	19.638	75%	26.430	20.351	77%
DBH Pajak	3.381	1.725	51%	2.886	1.826	63%	3.386	1.935	57%
DBH Bukan Pajak	4.325	2.549	59%	4.161	3.738	90%	3.953	2.575	65%
DAU	11.631	9.550	82%	11.838	9.744	82%	12.312	11.442	93%
DAK	3.704	1.792	48%	5.492	2.599	47%	3.874	2.556	66%
DID dan Dana Penyesuaian	3.256	2.333	72%	1.015	649	64%	1.400	893	64%
Transfer Provinsi	769	570	74%	900	1.083	120%	1.506	949	63%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.525	1.292	85%	1.305	823	63%	2.054	964	47%
Hibah	17	3	20%	65	28	43%	678	213	31%
Dana Darurat							-	-	
Bantuan Keuangan	181	186	103%	13	34	257%	15	14	91%
Lain-lain	1.327	1.103	83%	1.227	761	62%	1.360	738	54%
TOTAL PENDAPATAN	34.144	23.015	67%	33.462	23.698	71%	35.278	25.596	73%

Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2018, diolah)

Realisasi pendapatan APBD sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp25,6 triliun, meningkat 2 persen dibandingkan periode yang sama Tahun 2017 dan tumbuh 6 persen dibandingkan Tahun 2016. Sebuah prestasi yang cukup menggembirakan karena peningkatan tersebut mayoritas berasal dari realisasi PAD, sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah justru merosot turun setiap periodenya sehingga pada Triwulan III Tahun 2018 capaiannya hanya 47 persen dari pagu Rp2,05 triliun.

Sedangkan pada sisi realisasi belanja APBD sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp21,08 triliun, meningkat 3 persen dibandingkan periode yang sama Tahun 2017. Peningkatan tersebut berasal dari realisasi bagi hasil ke kabupaten/kota/desa pada periode sebelumnya 50 persen menjadi 71 persen, sedangkan belanja modal dari tahun ke tahun realisasinya masih rendah dibawah 50 persen dimana pada Triwulan III Tahun 2018 baru mencapai 43 persen. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus

mengingat belanja modal merupakan belanja diharapkan memiliki efek *multiplier* paling besar terhadap perekonomian.

Tabel III.2. Realisasi Belanja APBD s.d Triwulan III tahun 2016-2018 (miliar Rp)

APBD Klasifikasi Ekonomi	2016			2017			2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Operasi	23.232	14.329	62%	24.103	14.901	62%	25.119	15.973	64%
Belanja Pegawai	11.875	7.808	66%	11.543	7.648	66%	12.255	7.877	64%
Belanja Barang dan Jasa	7.086	3.467	49%	7.559	3.818	51%	8.555	4.329	51%
Belanja Bunga	8	5	59%	14	6	45%	56	10	17%
Belanja Subsidi	41	28	66%	47	25	52%	53	28	52%
Belanja Hibah	2.379	1.758	74%	2.052	1.583	77%	2.096	2.488	119%
Belanja Bantuan Sosial	20	7	36%	15	5	33%	225	125	55%
Belanja Bantuan Keuangan	1.823	1.256	69%	2.872	1.816	63%	1.879	1.118	59%
Belanja Modal	8.283	3.008	36%	7.995	3.330	42%	7.946	3.440	43%
Belanja Tanah	376	117	31%	266	56	21%	96	111	116%
Belanja Peralatan dan Mesin	836	325	39%	860	339	39%	899	415	46%
Belanja Gedung & Bangunan	1.653	473	29%	1.594	611	38%	1.417	600	42%
Belanja Jalan dan Jaringan	5.307	2.054	39%	4.651	1.886	41%	5.259	2.180	41%
Belanja Aset Tetap Lainnya	102	33	33%	109	89	82%	254	106	42%
Belanja Aset Lainnya	9	5	61%	515	349	68%	22	28	125%
Belanja Tak Terduga	48	4	9%	94	7	8%	112	4	3%
Transfer/ Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa	1.815	977	54%	1.155	579	50%	2.334	1.658	71%
TOTAL	33.377	18.318	55%	33.346	18.818	56%	35.512	21.075	59%

Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2018, diolah)

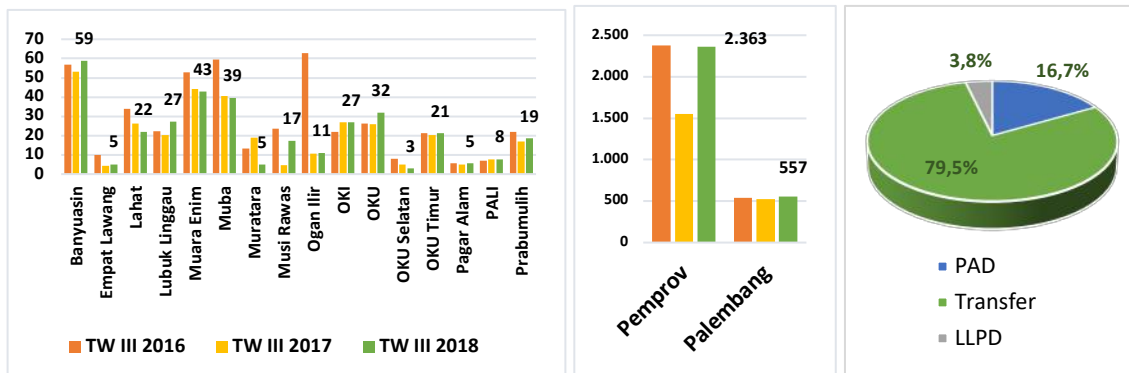
A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 mencapai 73 persen dari target (Rp35,28 triliun).

1. Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah secara agregat sampai dengan triwulan III tahun 2018 mencapai Rp3,26 triliun atau mencapai 74 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian penerimaan pajak daerah tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 8 persen dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2017.

Grafik III.1 Komposisi dan Realisasi Pajak Daerah Triwulan III Tahun 2016-2018 (miliar Rp)



Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2018, diolah)

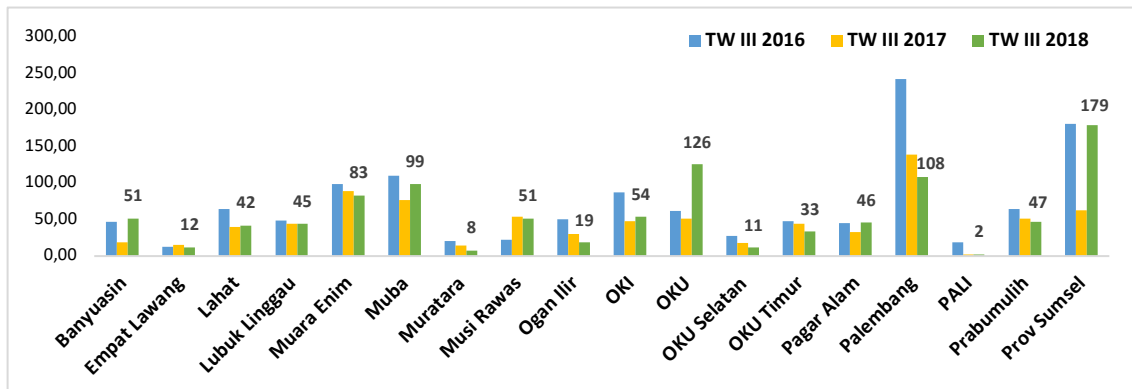
Provinsi Sumsel memberikan kontribusi terbesar capaian Pajak Daerah sebesar Rp2,36 triliun atau 72 persen dari agregat penerimaan Pajak Daerah se-Provinsi Sumsel yang merupakan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Berdasarkan tingkat persentase capaian, Kabupaten Ogan Ilir merupakan yang terendah yaitu hanya mencapai 10 persen dari pagu Rp111,4 miliar. Kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah yaitu PAD 16,7 persen, Pendapatan Transfer 79,5 persen dan LLPD (Lain-lain pendapatan daerah yang sah) 3,8 persen. Berdasarkan kontribusi ini dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan pemda terhadap dana transfer pusat sangat tinggi yang berarti pula bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah sangat rendah.

Tingkat kemandirian keuangan daerah diperoleh dari rasio PAD terhadap pendapatan daerah sangat rendah dimana mayoritas di bawah rata-rata regional (17 persen). Daerah yang berada di atas rata-rata regional yaitu Provinsi Sumatera Selatan 37 persen, Kota Palembang 23 persen sedangkan di Pemda yang relatif baru di Kabupaten Empat Lawang, Muratar, PALI jauh lebih rendah dari rata-rata regional bahkan di bawah 2 persen.

2. PAD Lainnya (RD, HPKD, LLPAD)

PAD lainnya merupakan komponen PAD selain pajak daerah yang meliputi Retribusi Daerah (RD) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKD), dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPAD) yang pada triwulan III tahun 2018 realisasinya hanya mencapai Rp.1,02 triliun (target Rp.2,4 triliun). Kinerja realisasi PAD lainnya dari tahun ke tahun semakin merosot dimana realisasinya pada Triwulan III Tahun 2016 s.d. Tahun 2018 masing-masing 50 persen, 46 persen dan 43 persen. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya realisasi retribusi daerah dimana pada triwulan III tahun 2018 hanya mencapai 34 persen dari pagu Rp244 miliar.

Grafik III.3. PAD Lainnya Triwulan III Tahun 2016-2018 (miliar Rp)



Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2018, diolah)

Dari grafik di atas terlihat bahwa penerimaan daerah lainnya triwulan III tahun 2018 yang menurun drastis terdapat di Kota Palembang didorong oleh realisasi retribusi pada triwulan III tahun 2018 hanya mencapai 25,3 persen dari pagu Rp129,5 miliar sehingga menyebabkan kinerja realisasinya menjadi yang terendah diantara 17 Pemda lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh penetapan anggaran retribusi daerah tidak didasarkan pada potensi retribusi sehingga target retribusi ditetapkan terlalu tinggi.

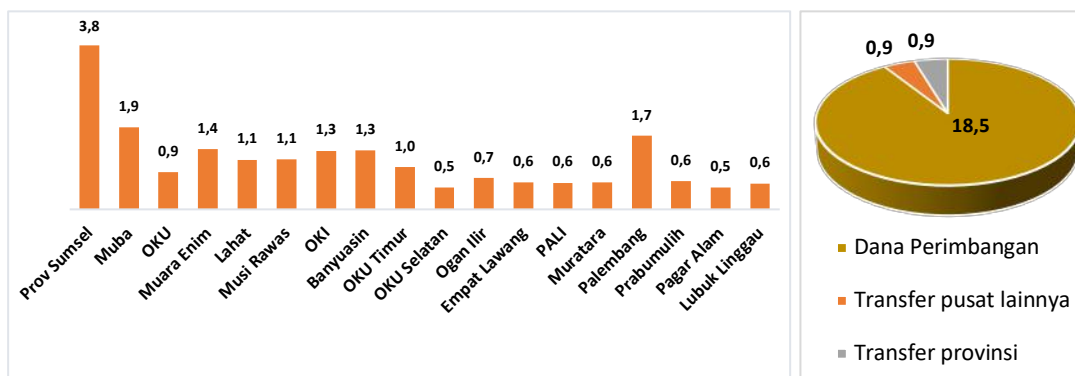
"..Informasi yang didapat dari hasil pemeriksaan atas dokumen APBD Induk diketahui bahwa penetapan anggaran retribusi daerah tidak didasarkan pada potensi retribusi dan perkiraan pertumbuhan ekonomi, dan penetapan anggaran hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah tidak didasarkan oleh adanya penetapan kepastian atas penerimaan dimaksud".

(<https://www.klikanggaran.com/anggaran/penyusunan-anggaran-retribusi-daerah-kota-palembang-tidak-cermat.html>, diakses tanggal 30 Oktober 2018)

3. Penerimaan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 telah mencapai 77 persen dari target Rp26,4 triliun yaitu Rp20,35 triliun, yang bersumber dari transfer pemerintah pusat Rp19,4 triliun dan transfer pemerintah provinsi Rp0,9 triliun.

Grafik III.5. Komposisi & Penerimaan Transfer Triwulan III Tahun 2018 (miliar Rp)



Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2018, diolah)

Dilihat dari komposisinya, penerimaan transfer pusat memberikan kontribusi di atas 75 persen dari total pendapatan daerah. Penerimaan transfer triwulan III tahun 2018 didominasi oleh DAU (56%), DBH (23%), dan DAK (13%). Tingginya porsi DAU yang melebihi DBH tersebut sejalan dengan kebijakan penguatan desentralisasi dan perkembangan sektor migas yang belum membaik. Selain itu, DAK mendapatkan porsi yang signifikan sejalan dengan kebijakan transfer berbasis kinerja dimana penyaluran dana disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaannya.

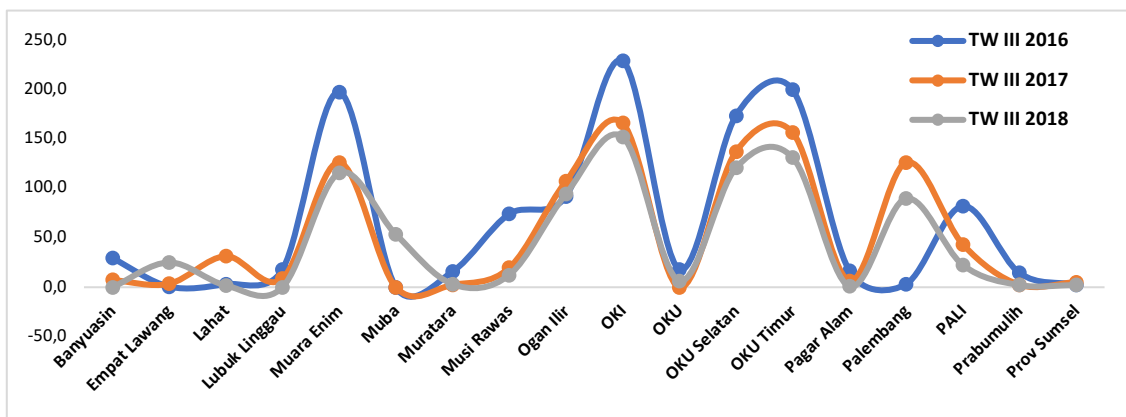
Kapasitas penerimaan transfer tertinggi adalah Provinsi Sumsel (Rp3,8 triliun), dan Kabupaten Muba (Rp1,9 triliun) diikuti Kota Palembang (Rp1,7 triliun) dan Kabupaten Muara Enim (Rp1,9 triliun). Tingginya transfer di Kabupaten Muba dan Kabupaten Muara Enim didorong oleh produksi migas dan batubara di kedua daerah tersebut.

*"..Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Taukhid menyatakan realisasi dana transfer dan dana desa sampai dengan bulan Agustus 2018 sebesar 66% (Rp 18,734 triliun)."
<http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20180930105237029382971>, diakses tanggal 25 Oktober 2018)*

4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPD)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPD) triwulan III tahun 2018 realisasinya hanya mencapai Rp964 miliar (target Rp.2,05 triliun).

Grafik III.3. LLPD yang Sah Triwulan III Tahun 2016-2018 (miliar Rp)



Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2018, diolah)

Tren Kinerja realisasi LLPD dari tahun ke tahun semakin menurun dimana realisasinya pada Triwulan III Tahun 2016 s.d. Tahun 2018 masing-masing 85 persen, 63 persen dan 47 persen. Hal ini didorong oleh menurunnya realisasi penerimaan hibah dimana pada triwulan III tahun 2018 hanya mencapai 31 persen dari pagu Rp678 miliar.

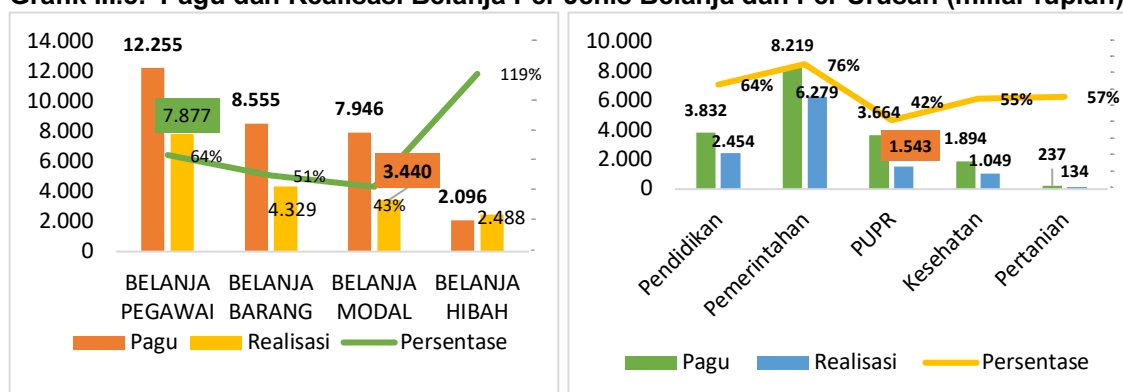
B. Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer/ Bagi Hasil Ke Daerah. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp21,07 triliun (59,3 persen).

1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Belanja pegawai dan belanja barang merupakan jenis belanja dengan pagu tertinggi masing-masing Rp12,25 triliun dan Rp8,5 triliun dengan realisasi Rp7,8 triliun (64%) dan Rp4,3 triliun (51%). Sedangkan belanja modal yang merupakan belanja produktif antara lain untuk infrastruktur realisasinya baru sebesar Rp3,4 triliun (43 persen). Belanja hibah dengan realisasi tertinggi mencapai 119 persen antara lain digunakan untuk pelaksanaan Pilkada yang telah dilaksanakan bulan Juni 2018.

Grafik III.8. Pagu dan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja dan Per Urusan (miliar rupiah)



Sumber : Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (2018), diolah

2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Pagu belanja berdasarkan urusan yang tertinggi yaitu pada urusan pemerintahan, pendidikan dan pekerjaan umum (PUPR) masing-masing Rp8,2 triliun, Rp3,8 triliun dan Rp3,6 triliun. Meskipun pagu PUPR cukup tinggi namun penyerapannya terendah yaitu 42 persen.

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018

Metode yang digunakan untuk menghitung prognosis atau perkiraan realisasi APBD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 adalah menggunakan analisis tren. Data yang digunakan merupakan data realisasi APBD tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017. Pada tabel III.3. terlihat bahwa pendapatan daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 diperkirakan mencapai 99,61 persen dari target Rp35,28 triliun. Sedangkan realisasi belanja daerah diperkirakan mencapai 88,87 persen dari pagu Rp35,51 triliun.

Tabel III.3. Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan IV Tahun 2018 dengan analisis tren (triliun rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi Triwulan III		Perkiraan Real s.d. Tw IV	
		Rp	%	Rp	%
Pendapatan Daerah	35.28	25.60	72.56%	35.14	99.61%
Belanja Daerah	35.51	21.08	59.35%	31.56	88.87%

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu.

Pendapatan negara konsolidasian sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 12,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya komponen pendapatan perpajakan dan hibah. Pajak dalam negeri sebagai komponen terbesar pendapatan perpajakan meningkat 15,54 persen sedangkan pada komponen hibah melonjak 177,25 persen dari tahun sebelumnya dan seluruhnya berasal dari hibah Pemerintah Daerah lainnya. Pada komponen pendapatan bukan pajak terjadi penurunan sebesar 0,16 persen.

Tabel IV.1. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan III Tahun 2018 (miliar jutaan Rupiah)

Uraian	Triwulan III 2018				Triwulan III 2017
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasian
Pendapatan Negara	8.187,39	5.231,67	13.419,06	12,41%	11.938,09
Pendapatan Perpajakan	6.770,88	3.263,04	10.033,92	15,54%	8.684,19
PNBP	1.416,51	1.755,61	3.172,12	-0,16%	3.177,07
Hibah	0,00	213,02	213,02	177,25%	76,83
Transfer *)	0,00	19.671,65	19.671,65	0,13%	19.645,46
Belanja Negara	10.251,10	18.182,44	28.433,55	11,15%	25.581,54
Belanja Pemerintah	10.251,10	18.182,44	28.433,55	11,15%	25.581,54
Transfer *)	21.310,66	2.237,60	23.548,26	19,87%	19.645,46
Surplus (Defisit)	-23.374,37	-12.950,78	-18.891,10	38,46%	-13.643,44
Pembiayaan		0,00	-207,66	-86,17%	-1.501,86
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	593,98	593,98	20,67%	492,22
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	801,63	801,63	-59,80%	1.994,09
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	-23.374,37	-13.158,43	-19.098,75	26,10%	-15.145,31

*) Pendapatan Transfer dan Belanja/Pengeluaran Transfer dieliminasi

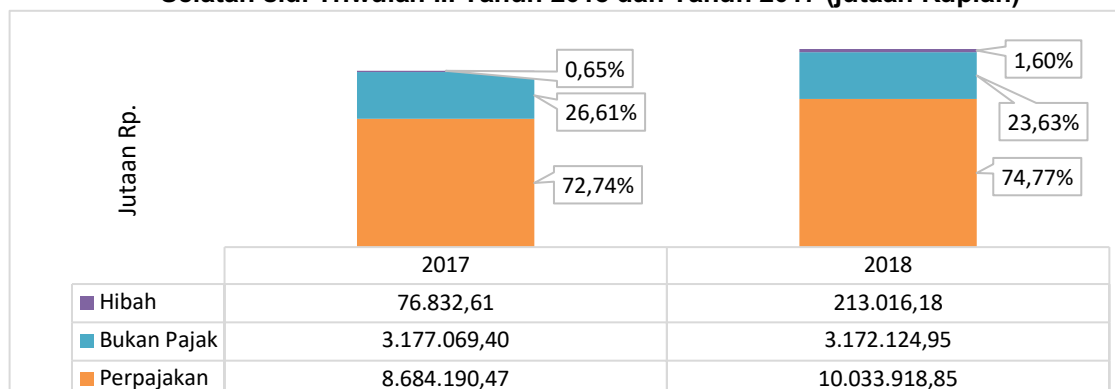
Sumber: LKPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel (2018), diolah.

B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

Pendapatan Konsolidasian adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun *resiprokal* (berelasi).

Analisis Proporsi dan Perbandingan

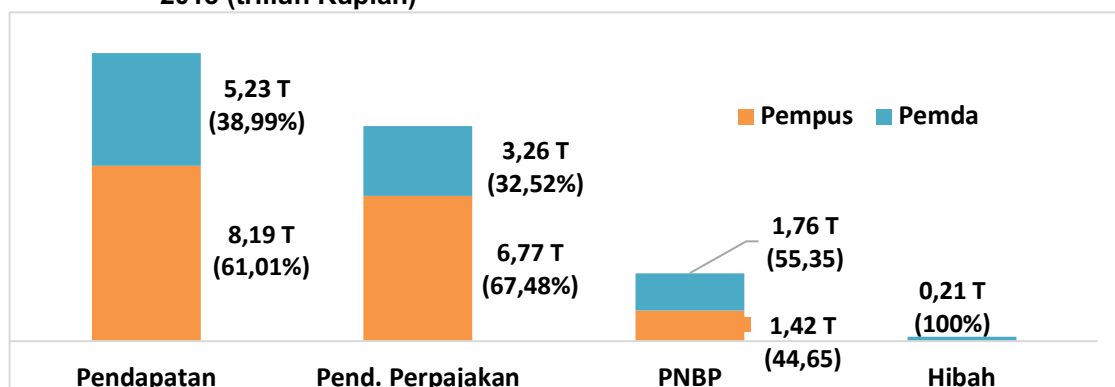
Grafik IV.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan III Tahun 2018 dan Tahun 2017 (jutaan Rupiah)



Sumber: LKPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel (2018), diolah.

Grafik IV.1 menunjukkan komposisi pendapatan konsolidasian sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 didominasi oleh penerimaan perpajakan sebesar 74,77 persen. Penerimaan perpajakan secara nominal meningkat 15,54 persen atau mencapai Rp10.033,92 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini sejalan dengan program pemerintah yang sedang menggenjot penerimaan pajak terutama dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Dari sisi proporsi, terjadi peningkatan persentase penerimaan perpajakan dari 72,74 persen menjadi 74,77 persen. Namun pendapatan bukan pajak mengalami penurunan proporsi dari 26,61 persen turun menjadi 23,63 persen. Terdapat 2 (dua) komponen pendapatan yang tumbuh signifikan, yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan hibah.

Grafik IV.2 Perbandingan Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan III Tahun 2018 (triliun Rupiah)



Sumber: LKPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel (2018), diolah.

Grafik IV.2 menunjukkan bahwa pendapatan konsolidasian didominasi oleh pendapatan pemerintah pusat sebesar 61,01 persen, sedangkan pendapatan pemerintah daerah mencapai 38,99 persen. Apabila dilihat lebih detail lagi, pendapatan tersebut didominasi

oleh pendapatan yang berasal dari pendapatan perpajakan. Pendapatan perpajakan itu sendiri didominasi oleh penerimaan dari pemerintah pusat sebesar 67,48 persen. Namun dominasi pemerintah pusat tidak terjadi pada penerimaan bukan pajak, yang mayoritas penerimaannya berasal dari pemerintah daerah yang mencapai 55,35 persen. Sedangkan penerimaan lainnya, yaitu hibah seluruhnya berasal dari pemerintah daerah atau 100 persen.

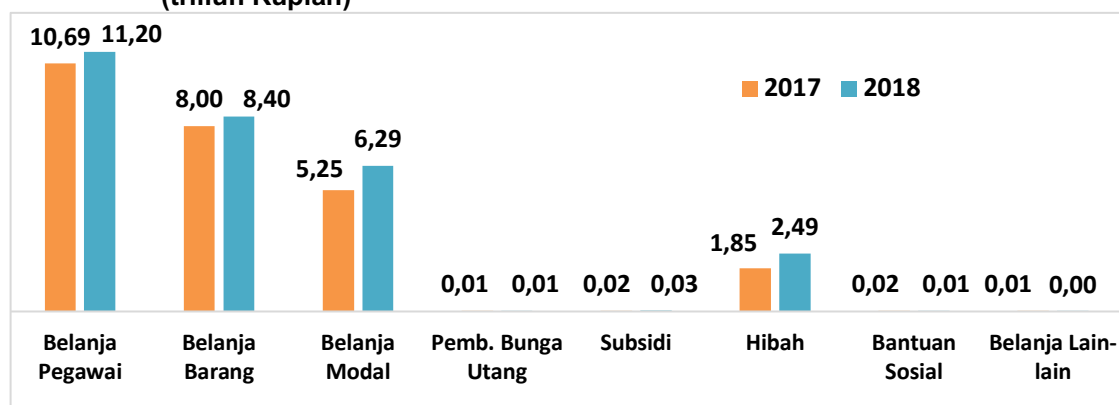
C. BELANJA KONSOLIDASIAN

Belanja Konsolidasian adalah konsolidasian antara seluruh belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun *resiprokal* (berelasi).

Analisis Proporsi dan Perbandingan

Belanja Konsolidasian sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 9,98 persen dari Rp25,85 triliun pada Triwulan III Tahun 2017 menjadi Rp28,43 triliun. Kontribusi belanja paling besar berasal dari belanja pegawai yang mencapai 39,40 persen dari total belanja konsolidasian. Namun apabila dilihat dari sisi pertumbuhan belanja, terdapat belanja dengan tingkat pertumbuhan terbesar yaitu belanja modal yang tumbuh sebesar 19,80 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang bersifat produktif meningkat dari tahun sebelumnya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Rincian belanja konsolidasian dapat dilihat pada Grafik IV.3 di bawah ini:

Grafik IV.3 Perbandingan Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja Konsolidasian pada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2018 (triliun Rupiah)



Sumber: LKPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel (2018, diolah).

Hal lain yang dapat dilihat secara lebih detail dari grafik di atas adalah belanja pegawai mengalami peningkatan sebesar 7,5 persen, sedangkan belanja barang naik 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk jenis belanja lainnya seperti hibah mengalami

peningkatan yang cukup signifikan sebesar 34,59 persen. Belanja hibah ini berupa hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dan organisasi kemasyarakatan. Namun untuk belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain masing-masing turun 22,96 persen dan 74,82 persen.

D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Berikut adalah ringkasan Laporan Operasional sebagai salah satu komponen Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan III Tahun Pelaporan 2018:

Transaksi yang mempengaruhi kekayaan netto		
Pendapatan		47.353.104.333.988
a	Pajak	10.033.568.870.407
b	Kontribusi Sosial	-
c	Hibah	3.307.164.401.098
d	Pendapatan Lain	34.012.371.062.483
Beban		47.353.104.333.988
a	Kompensasi Pegawai	11.452.823.449.134
b	Pembangunan Barang dan Jasa	7.614.169.707.679
c	Konsumsi aset tetap	-
d	Bunga	9.594.084.849
e	Subsidi	27.746.112.835
f	Hibah	7.815.567.994.582
g	Manfaat Sosial	13.401.561.950
h	Beban lainnya	1.423.997.835.942
Keseimbangan operasi bruto/neto		18.995.803.587.018
Transaksi Aset Non Keuangan Neto		6.287.117.860.088
a	Aset tetap	6.116.669.051.483
b	Persediaan	-
c	Barang Berharga	-
d	Aset Non Produksi	170.448.808.605
Net Lending Borrowing		12.708.685.726.930
Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban		11.422.190.935.331
a	Akuisisi Neto Aset Keuangan	12.065.438.331.130
	-Domestik	12.065.438.331.130
	-Luar Negeri	
b	Keterjadian Kewajiban	(643.247.395.799)
	-Domestik	(643.247.395.799)
	-Luar Negeri	
SILPA Konsolidasian		

Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Belanja Pemerintah dihitung dengan cara membandingkan nilai Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan PDRB. Sedangkan kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Investasi dihitung dari perbandingan nilai PMTB dibagi dengan PDRB.

Dari tabel laporan operasional tersebut diatas dan data BPS dapat diketahui bahwa:

1. Pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar Rp11.080.394.718.763,- yang terdiri dari:
 - a. Kompensasi pegawai sebesar Rp11.452.823.449.134,-
 - b. Penggunaan barang dan jasa sebesar Rp7.614.169.707.679,-
 - c. Konsumsi aset tetap sebesar Rp0,-
 - d. Manfaat sosial sebesar Rp13.401.561.950,-
2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PTMB) sebesar Rp6.116.669.051.483,-
3. PDRB Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp109,7 triliun.

Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB dapat diketahui dengan membandingkan pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut terhadap PDRB sehingga angka yang diperoleh adalah sebesar 10,94 persen. Demikian juga kontribusi belanja aset tetap pemerintah sebagai PMTB dari pemerintah dibandingkan dengan nilai PDRB sehingga diperoleh angka sebesar 5,67 persen. Dilihat dari kontribusi tersebut, pengeluaran konsumsi pemerintah atau belanja pemerintah memiliki peran yang cukup besar terhadap perekonomian Sumatera Selatan. Belanja pemerintah khususnya belanja barang dan belanja pegawai bersifat jangka pendek dalam mempengaruhi perekonomian, misalnya pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di triwulan berkenaan.

Dengan demikian peran belanja pemerintah sebagai stimulus ekonomi kurang optimal apabila realisasi belanja pemerintah tidak terserap secara proporsional dan cenderung menumpuk di akhir tahun. Hal ini berbeda dengan belanja aset tetap pemerintah atau investasi pemerintah yang hanya memiliki kontribusi sebesar 2,74 persen terhadap perekonomian Sumatera Selatan. Meskipun memiliki kontribusi yang tidak signifikan, namun pengaruh terhadap perekonomian akan dirasakan di masa-masa akan datang karena bersifat jangka panjang.

IV. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

A. Tantangan Ekonomi Sumatera Selatan: Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi Pasca Pelaksanaan *Asian Games* 2018

Kesuksesan pelaksanaan *event Asian Games* 2018 di Kota Palembang diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi mulai dari masa persiapan sejak beberapa tahun lalu sampai dengan pelaksanaan *Asian Games* 2018. Data pertumbuhan ekonomi terakhir yang di-*release* BPS menunjukkan ekonomi Sumsel pada saat *event Asian Games* 2018 tumbuh sebesar 6,14 persen. Sumber pertumbuhan tersebut antara lain dari Sektor Konstruksi yaitu dengan banyaknya proyek-proyek infrastruktur yang dibangun dalam rangka persiapan *Asian Games* 2018. Sektor lain yang juga meningkat pertumbuhannya adalah Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman yang memang sangat berhubungan erat dengan banyaknya kunjungan wisatawan selama penyelenggaraan *Asian Games*.

Saat ini tantangan yang dihadapi Sumatera Selatan setelah penyelenggaraan *Asian Games* 2018 adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tersebut sehingga dapat terus bertumbuh signifikan dan memberikan manfaat kesejahteraan yang meningkat bagi masyarakat. Berkaca dari penyelenggaraan *Sea Games* tahun 2011 yang juga dilaksanakan di Kota Palembang, momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama sebelum dan pada saat penyelenggaraan *Sea Games* tahun 2011 ternyata tidak dapat dipertahankan karena setelah penyelenggaraan *Sea Games* 2011 kemudian pertumbuhan ekonomi cenderung menunjukkan tren penurunan. Agar kondisi tersebut tidak kembali terulang pada saat ini maka perlu dilakukan upaya-upaya antara lain dengan optimalisasi penggunaan infrastruktur yang telah dibangun untuk mendukung pelaksanaan *Asian Games* 2018, mengembangkan pembangunan ke daerah penyangga, dan optimalisasi instrumen fiskal di Wilayah Sumatera Selatan.

Terdapat beberapa proyek infrastruktur besar yang dibangun untuk mendukung Kota Palembang pada saat menjadi salah satu tuan rumah *Asian Games* 2018. Infrastruktur tersebut diantaranya adalah jaringan *Light Rail Transit* (LRT) di Kota Palembang dan kompleks olahraga *Jakabaring Sport City*. Dengan telah selesainya pelaksanaan *Asian Games* 2018 maka pemanfaatan infrastruktur tersebut harus dapat dioptimalkan sehingga dapat mendukung perkembangan perekonomian Sumatera Selatan. LRT yang dibangun dengan dana APBN sebesar Rp10,8 triliun harus dikelola secara serius sehingga dapat terus menarik minat masyarakat untuk menggunakannya sebagai pilihan utama dalam mobilitas sehari-hari. Jika minat masyarakat untuk menggunakan LRT terus meningkat maka selain akan menghasilkan pendapatan yang besar bagi pihak pengelola juga akan menjadi magnet pertumbuhan Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya.

Berbagai *venue* olahraga beserta sarana dan prasana yang terdapat di *Jakabaring Sport City* juga harus terus dikelola secara profesional sehingga dapat menghasilkan pendapatan dan mendorong perkembangan perekonomian di Sumatera Selatan. *Sport tourism* yang menjadi program pemerintah Provinsi Sumsel harus diwujudkan secara

berkesinambungan sehingga pemanfaatan berbagai venue dan fasilitas olahraga bertaraf internasional yang ada di Sumsel dapat memberikan manfaat ekonomi dan menjadi sumber pertumbuhan bagi sektor-sektor lainnya. Diperlukan dukungan kebijakan yang tepat agar seluruh infrastruktur yang ada dapat bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik langsung maupun tidak langsung sehingga tidak justru menjadi beban karena biaya operasional yang cukup besar untuk mengelola infrastruktur tersebut.

Selanjutnya adalah pembangunan ekonomi di Sumatera Selatan agar diarahkan tidak hanya di Kota Palembang tetapi juga harus menyebar ke daerah-daerah penyangga ibukota provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Selatan. Kondisi perekonomian kabupaten/kota di Wilayah Sumatera Selatan mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap harga bahan mentah di pasar internasional dari komoditas pertambangan dan perkebunan yang memang menjadi komoditas utama yang dihasilkan Sumatera Selatan. Kendala saat ini adalah harga komoditas tersebut di pasar internasional tidak sedang dalam tingkat yang cukup menguntungkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat sehingga berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian. Upaya yang perlu segera dilakukan adalah hilirisasi produk-produk pertanian, perkebunan dan pertambangan tersebut sehingga mempunyai nilai tambah yang tinggi dan menguntungkan masyarakat. Program hilirisasi tersebut utamanya perlu dilakukan di sentra-sentra penghasil karet, sawit, batubara dan minyak seperti Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten MUBA, Kota Prabumulih dan kota/kabupaten lainnya di Sumatera Selatan.

Terakhir adalah optimalisasi instrumen fiskal untuk dapat secara optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Instrumen fiskal yang perlu dioptimalisasikan tersebut diantaranya adalah DAK Fisik, Dana Desa, dan yang akan mulai dialokasikan tahun 2019 adalah Dana Kelurahan. DAK Fisik yang disalurkan melalui APBN ke APBD berdasarkan perencanaan yang diusulkan Pemerintah Daerah hendaknya dapat dioptimalkan penyerapannya sehingga dapat mendukung kebutuhan infrastruktur daerah sebagaimana yang dibutuhkan daerah. Demikian juga Dana Desa yang menjadi program pemerintah untuk Membangun Mulai Dari Pinggiran akan memberikan manfaat besar bagi perekonomian desa dan Sumsel pada umumnya jika penyerapan dan penggunaannya dapat dioptimalisasikan sesuai ketentuan. Kemudian Dana Kelurahan yang akan mulai tahun depan jika dapat dioptimalisasikan akan dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi Sumatera Selatan khususnya di setiap kelurahan untuk dapat semakin berkembang mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang signifikan.

Euforia kesuksesan sebagai tuan rumah *Asian Games* 2018 memang memberikan kebanggaan tersendiri bagi Provinsi Sumatera Selatan namun tantangan terbesarnya justru baru dimulai saat ini. Tantangan tersebut adalah untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tinggi yang dihasilkan dari penyelenggaraan *Asian Games* 2018 tersebut sehingga dapat terus berkelanjutan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan optimalisasi infrastruktur yang sudah

ada, pengembangan daerah penyangga, dan optimalisasi instrumen fiskal. Jika hal-hal tersebut dapat dilakukan maka Investasi besar yang telah dilakukan dalam rangka menjadi tuan penyelenggaraan *Asian Games* 2018 benar-benar akan dapat dikonversi menjadi pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan bagi Provinsi Sumatera Selatan.

B. Dana Desa: Wujud Nyata Program Pemerintah Membangun Dari Pinggiran

Dana Desa merupakan program pemerintah terkait dengan Membangun Dari Pinggiran sekaligus juga sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara prinsip, pengelolaan keuangan dan aset yang ada di desa mengikuti pengaturan dalam pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2018, Dana Desa yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke Rekening Pemerintah Daerah di Wilayah Sumatera Selatan sebesar Rp1,39 triliun yang diperuntukkan bagi 14 kabupaten/kota yang memiliki desa di Sumatera Selatan. Dana tersebut oleh Pemerintah Daerah telah disalurkan ke 2853 rekening pemerintah desa untuk selanjutnya dipergunakan oleh desa sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam APBDes. Sampai dengan akhir tahun anggaran diharapkan total Dana Desa yang akan disalurkan pemerintah yaitu Rp2,31 triliun dapat diserap sebesar 100 persen sehingga manfaatnya dapat secara optimal.

Prioritas penggunaan Dana Desa dipergunakan untuk membiayai belanja pembangunan dan belanja pemberdayaan masyarakat desa. Belanja pembangunan desa berupa pemenuhan kebutuhan dasar (Poskesdes, Polindes, Posyandu, dan PAUD), pembangunan sarana dan prasarana desa (jalan desa, embung desa, air bersih, irigasi tersier, dsb), pengembangan potensi ekonomi local (BUMDes, pasar desa, lumbung pangan desa, tambatan perahu, dsb) dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (pengelolaan sampah, hutan desa, rumput laut, dsb). Sedangkan belanja pemberdayaan masyarakat desa berupa peningkatan kualitas proses perencanaan desa, pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan desa, mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes maupun oleh kelompok usaha dan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa.

Sejak digulirkan mulai tahun 2015, program Dana Desa telah menghasilkan berbagai output baik dalam bentuk sarana prasana fisik maupun pemberdayaan masyarakat yang menunjang pembangunan desa. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain kekurangan tenaga pendamping desa dan akses komunikasi dan transportasi ke beberapa desa yang masih sulit dicapai namun tidak mengurangi semangat para pihak untuk menyukseskan program ini. Dengan perbaikan yang terus dilakukan dari waktu ke waktu maka efektivitas Dana Desa dalam mendukung visi Membangun Dari Pinggiran akan dapat semakin nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Sumatera Selatan.

